

TRADISI 'BAJONG BANYU' TAHUN 2025

Diwarnai Kegiatan Penghijauan Sendang

MAGELANG (KR) - Tradisi *Bajong Banyu* menjelang Puasa Ramadan masih lestari di Dusun Dawung, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Seperti dilakukan Minggu (23/2), dengan mengambil lokasi di areal tanah kosong tengah dusun, kegiatan *padusan* dengan istilah *Bajong Banyu* atau 'Perang Air'.

Saat aba-aba dimulai dari panitia disampaikan, masyarakat langsung melakukan *padusan* dengan 'Perang Air' menggunakan air dalam plastik putih tipis. Kemasan plastik-plastik tersebut juga ada yang ditempatkan pada drum plastik. Masyarakat saling melempar air, sehingga pakaian yang dikenakan menjadi basah kuyup. Prosesi pengambilan air

dari Sendang Kedawung yang berjarak sekitar 500-750 meter dari lokasi kegiatan Bajong Banyu dilakukan beberapa tokoh masyarakat. Berbeda dengan prosesi pengambilan air tahun-tahun sebelumnya, kali ini disertai kegiatan penanaman pohon di sekitar sendang atau mata air.

Gepeng Nugroho, salah satu warga mengatakan, pada tahun ini debit air di

sendang atau mata air sudah mulai menurun. Karena itu dilakukan penghijauan di sekitar sendang. Tidak semua tokoh desa mengambil air, hanya diwakili seorang sesepuh. "Biasanya kita hanya menerima, sekarang *take and give* atau memberi dan menerima," kata Gepeng Nugroho.

Menurutnya, sekarang ini saatnya memberi kepada alam. Penghijauan dilakukan warga dengan cara menanam bibit pohon pule sebagai simbol tanaman obat dan tanaman kerajinan serta bibit pohon kedawung, sekaligus dengan proses penyemaiannya. Secara simbolis ada 11 pohon yang ditanam, sedang untuk kedawung ratusan benih yang ditekarkan.

"Selain menyebarkan bibit, juga menyemai," katanya. Setelah tumbuh dengan baik, benih tersebut akan ditanam.

Kemasan tradisi *Bajong Banyu* tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-11. *Bajong Banyu* diangkat dari tradisi *padusan* dengan bermain air atau Perang Air. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi event pariwisata budaya, dan dapat disambut baik oleh warga sekitar, yang kemudian mengemas acara ini.

Rangkaian kegiatan apresiasi seni berupa Gelar Budaya Kesenian Rakyat juga digelar hingga malam hari. Ada beberapa kelompok kesenian yang tampil dengan berbagai karya seni kerakyatan. **(Tha)** f



KR-M Thoha

Penyiraman air dari dalam drum besar pada tradisi 'Bajong Banyu' menjelang Puasa Ramadan.

Era Baru Sumbangan hal 1

Dana-dana yang dikelola Danantara, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir dan produksi pangan.

Presiden saat menghadiri acara partainya pada 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan dana Danantara. "Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu

pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan dari KWI dan lain-lain ikut juga membantu mengawasi," ucap Prabowo.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menyakini Presiden RI Prabowo Subianto telah mengantongi nama yang tepat untuk dipadukan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). "Kalau ditanya siapa kepalanya? Siapa yang memegangnya? Saya yakin Pak Prabowo sudah punya nama untuk itu dan saya yakin Pak Prabowo tidak salah untuk menentukan siapa dari ketua atau kepala dari Danantara tersebut," kata Eko Patrio, di

Kompleks Parlemen, Minggu (23/2).

Terkait sorotan publik yang bertendensi bila pengelolaan BPI Danantara lebih baik diserahkan kepada kalangan profesional dibandingkan kalangan politik agar bebas dari intervensi atau kepentingan politik tertentu, ia menilai hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar.

Menurut Eko, sosok yang akan ditunjuk Presiden Prabowo sebagai pemimpin BPI Danantara nantinya harus paham bagaimana mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Paham tentang aset nasional kita, dalam arti kata BUMN itu apa saja. Lalu bagaimana *me-leverage* (menggunkit) yang tadi asetnya satu bisa menjadi lima, yang 100 bisa menjadi 1.000," ucapnya.

Hal tersebut, katanya, agar BPI Danantara mampu mengakselerasikan diri sebagai superholding BUMN dan lembaga pengelola investasi berkelas dunia layaknya keberadaan lembaga serupa di negara lain. **(Ant/Obi)** f

400 Pegawai Sumbangan hal 1

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang ditunjuk Trump sebagai Penjabat Kepala USAID, sebelumnya mengatakan bahwa Pemerintah akan meninjau ulang badan tersebut untuk memastikan program-programnya didanai sesuai kebi-

jakan luar negeri Pemerintah AS saat ini.

Rubio, yang menilai dana USAID selama ini telah 'merugikan' AS mengatakan, bantuan bisa saja dicairkan kembali atau bahkan ditingkatkan setelah evaluasi dilakukan. **(Ant)** f

Band Sumbangan hal 1

menjadi organisasi yang bisa betul-betul adaptif menerima koreksi untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik," ujarnya.

Kapoli juga menegaskan bahwa kepolisian tidak antikritik dan menerima berbagai masukan yang diberikan oleh masyarakat. "Bagi kami, kritik terhadap Poli menjadi bentuk kecintaan masyarakat ter-

hadap institusi Poli," tambahnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Poli Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Poli menuju organisasi yang modern dengan tidak antikritik. Poli pernah memberikan forum penyampaian kritik melalui kegiatan seni, salah satunya stand up comedy. "Kami ada stand up comedy. Bagaimana dengan segmen-segmen ko-

munitas-komunitas itu bisa memberikan masukan melalui kritik," ujarnya.

Adapun segala kritik yang ditujukan kepada Poli, ujar Trunoyudo, menjadi evaluasi bagi pihaknya. "Terutama pada Poli yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kami sangat menghargai ekspresitu," jelasnya. **(Ant/Has)** f

Danantara Sumbangan hal 1

Bisa dikatakan bahwa Danantara merupakan sebuah inisiatif baru dari pemerintah yang memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Kebutuhan dana Pemerintah diharapkan dapat dipenuhi oleh Danantara.

Model pengelolaan Danantara mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited, sebuah perusahaan investasi milik pemerintah Singapura yang sukses mengelola aset negara. Struktur organisasinya terdiri atas Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pengelola Danantara dan di haramkan berasal dari orang partai.

Ada beberapa tugas berat yang bakal diemban oleh Danantara, paling tidak ada empat tugas utama.

Pertama, mengelola aset negara, termasuk dana dari ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dan aset dari berbagai kementerian. Tujuannya adalah untuk menginvestasikan dana tersebut pada proyek-proyek berkelanjutan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN).

Kedua, menjadi sumber pendanaan baru bagi keuangan negara, sehingga tidak hanya bergantung pada APBN.

Ketiga, Danantara akan menjadi wadah untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan ekonomi negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuannya adalah agar kekayaan negara dapat dikelola dan difokuskan pada program-program yang dapat memajukan Indonesia.

Keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada proyek-proyek strategis, dengan menjadi mesin dan energi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Meskipun memiliki tujuan yang baik, pembentukan Danantara juga menimbulkan beberapa kontroversi dan polemik di masyarakat, terutama melalui medsos. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain:

Pertama, potensi konflik kepentingan: Muncul kekhawatiran terkait potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan

dana Danantara, terutama terkait dengan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan investasi, mengingati dana yang dikelola boleh dibilang berjumlah sangat besar.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Danantara dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana atau praktik korupsi. Selama ini, transparansi dan akuntabilitas masih banyak di bibir saja, belum benar-benar diterapkan sehingga masyarakat merasa puas, mulai dari regulasi pemilu, penanganan berbagai masalah hukum, dan terutama masalah keuangan, seperti pemangkasan APBN.

Ketiga, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada efektivitas investasi yang dilakukan.

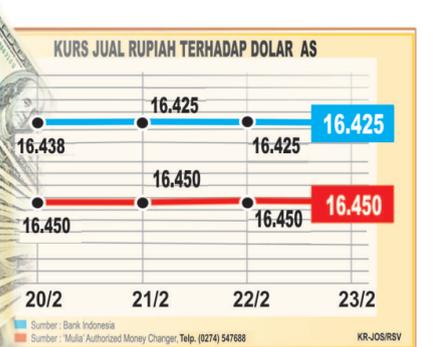
Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan pemilihan proyek-proyek yang tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, adakan pimpinan di republik ini yang mampu menghindarkan diri dari berba-

gai tekanan dan konflik kepentingan?

Keempat, Pemerintahan Prabowo Subianto senang dengan membentuk badan-badan baru, termasuk Danantara yang menyalin Temasek, badan serupa dari Singapura. Tapi ingat, tingkat korupsi di Singapura sangat minim dan pimpinan mereka benar-benar memikirkan negaranya, bukan untuk membela teman atau bahkan pimpinan partainya. Kalau di sini?

Masyarakat masih bertanya-tanya, apa benar dengan adanya Danantara ini Pemerintah bisa memiliki dana pembanguan lebih banyak? Bukankah masih banyak cara lain yang lebih jitu, misalnya dengan mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak, mengintensifkan pengelolaan tambang bukan dengan membagi-bagi konsesinya, dan menegakkan hukum terutama yang berkaitan dengan korupsi. Selama ini, hal-hal tersebut masih mendapat nilai merah dari publik.

(Penulis adalah Dosen STIE YKPN Yogyakarta dan pengurus ISEI Cabang Yogyakarta)



Prakiraan Cuaca			Senin, 24 Februari 2025			
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95

Anggrismo, SE MEdE
Kaprodi Ekonomi
Universitas Amikom Yogyakarta

DI tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia berada di persimpangan penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Isu efisiensi anggaran telah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa minggu terakhir.

Benarkah Efisiensi Anggaran untuk Kepentingan Rakyat?

Langkah-langkah efisiensi yang diambil meliputi pengurangan biaya operasional, pengoptimalan alokasi dana, dan penghematan dalam berbagai sektor. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengelola keuangan negara dengan lebih baik dan mengurangi defisit anggaran.

Seruan Penghematan: Sinyal Krisis Ekonomi?

Penghematan Anggaran telah menjadi fokus utama dalam beberapa bulan terakhir. Namun, seruan ini telah membuat Indonesia lupa pada masalah utama, yaitu kebocoran pendapatan negara. Pendapatan negara stagnan selama ini, sekitar 2 - 2,2 miliar dolar AS, meskipun ekonomi tumbuh dan eksploitasi sumber daya alam meningkat. Penghematan dilakukan untuk memastikan pembayaran utang tepat waktu, terutama kepada swasta dan dalam mata uang asing.

Menarik untuk dicermati apakah pengumuman penghematan besar-besaran ini sama dengan mengumumkan resesi, yang ditandai juga dengan penerimaan negara stagnan dan kewajiban utang menumpuk?

Karena dengan pengumuman resesi ini akan menambah beban utang atau bantuan luar negeri, karena keuangan Indonesia dianggap berisiko. Pemilik uang akan menuntut imbal hasil yang lebih besar atas investasi mereka. Apalagi, penghematan ini tidak masuk dalam skenario anggaran 2025 yang telah ditetapkan DPR.

Menteri Keuangan memberikan penjelasan mengenai kebijakan efisiensi yang diusulkan oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini tidak berarti pengurangan total belanja negara, melainkan lebih kepada penyesuaian dan revisi anggaran untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

Menteri Keuangan juga menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan cermat, tanpa mengorbankan program-program yang vital bagi masyarakat. Sehingga penghematan yang dilakukan harus tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini menegaskan bahwa pengurangan anggaran di sektor-sektor tertentu tidak akan mengganggu program-program yang sudah berjalan, melainkan akan dilakukan dengan cara yang lebih strategis.

Kebijakan efisiensi anggaran sering kali diklaim sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertanyaannya adalah, apakah efisiensi anggaran benar-benar berpihak pada rakyat? Kebijakan efisiensi anggaran sering kali menjadi alat untuk memotong belanja publik, yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas layanan publik. Misalnya, pengurangan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan dapat berdampak langsung pada akses dan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, efisiensi anggaran tidak selalu berarti bahwa pemerintah mengelola sumber daya dengan lebih baik; sebaliknya, bisa jadi itu adalah cara untuk menutupi kekurangan dalam pengelolaan keuangan. Sering kali kebijakan efisiensi ini tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas. Ketika pemerintah mengumumkan penghematan, masyarakat tidak selalu diberikan informasi yang jelas mengenai di mana dan bagaimana penghematan tersebut dilakukan. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan publik terhadap niat pemerintah.

Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi pengurangan belanja, tetapi juga dari sisi peningkatan pendapatan negara. Jika merujuk pada sistem ekonomi Islam sumber pendapatan negara bukan dari pajak tetapi dari salah satu sumber pendapatan negara misalnya dari sumber daya alam. Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam semestinya bisa mencukupi kebutuhan rakyatnya. Kesehatan dan pendidikan bisa gratis asalkan semua hasil dari SDA dikelola oleh negara dan dikembalikan untuk rakyat bukan diserahkan pada oligarki. Disinilah urgensi kepemimpinan yang mengurus rakyat, bukan menjadi pemalak bagi rakyatnya. Karena pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya karena ditanggannya nasib hidup orang banyak ditentukan. Wallahua'lam. ***

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park